



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HANIF
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHH : 82500

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 965.000.000

1. Tanah Seluas 28050 m2 di SIMEULUE, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/100 m2 di KOTA BANDA ACEH, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 518 m2 di SIMEULUE, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 397 m2 di KOTA BANDA ACEH, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 247.000.000

1. MOTOR, HONDA K1H02N14LO A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOBIL, TOYOTA CAMRY Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
3. MOBIL, SUZUKI X OVER Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 122.250.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 269.010.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.603.260.000

III. HUTANG

Rp. 162.152.773

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.441.107.227



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH

UNIT KERJA : RSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ICHWANUL FITRI, NST
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI DAN UMUM
3. NHK : 713078

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 380.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/160 m² di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 382.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, SUZUKI SPLASH Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 58.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 47.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 18.100.100

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 827.700.100

III. HUTANG Rp. 9.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 818.700.100

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH

UNIT KERJA : RSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WACHYOE HADI SAPUTRA
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR PELAYANAN
3. NHK : 672496

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.000.000.100

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/300 m2 di KOTA BANDA ACEH , HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.000.000.100

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 420.000.000

1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 655.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 2.825.000.000

Sub Total Rp. 5.910.000.100

III. HUTANG Rp. 150.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.760.000.100

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.